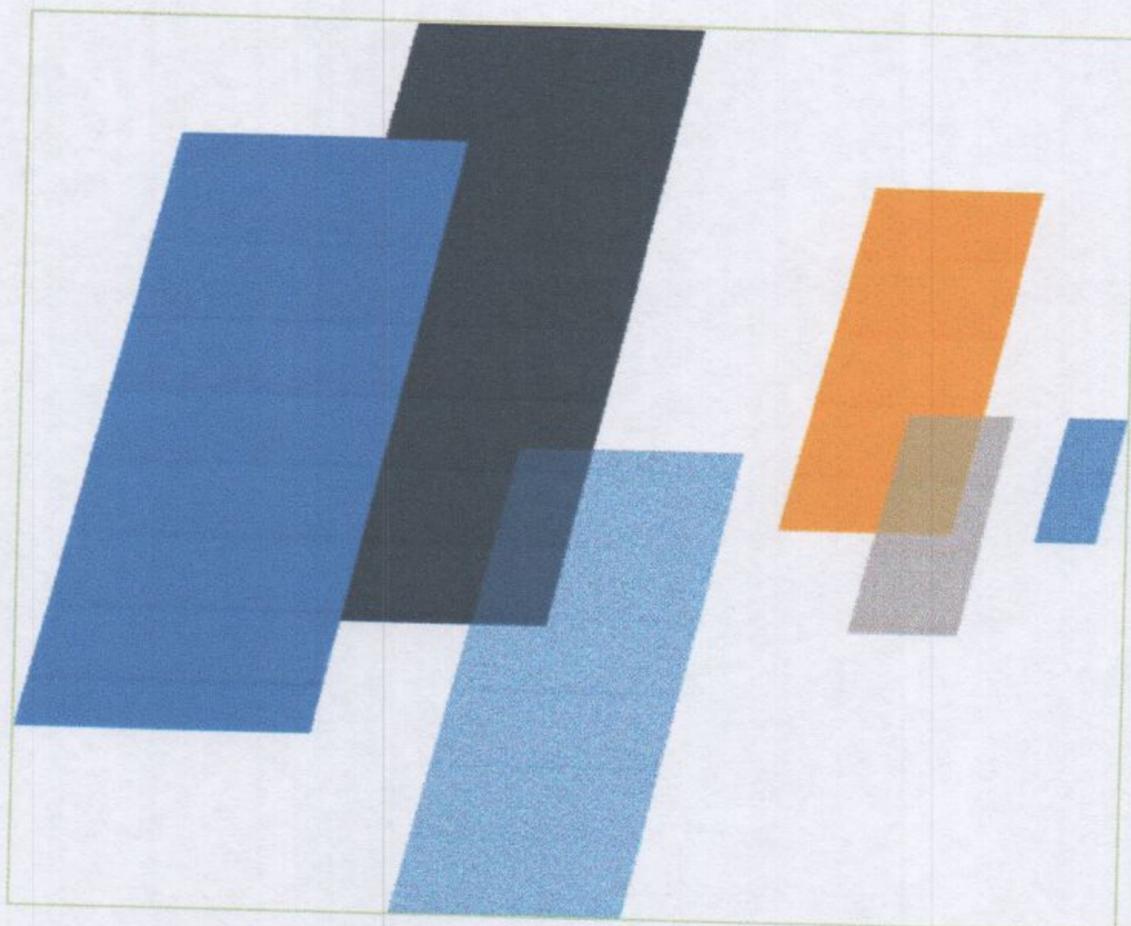
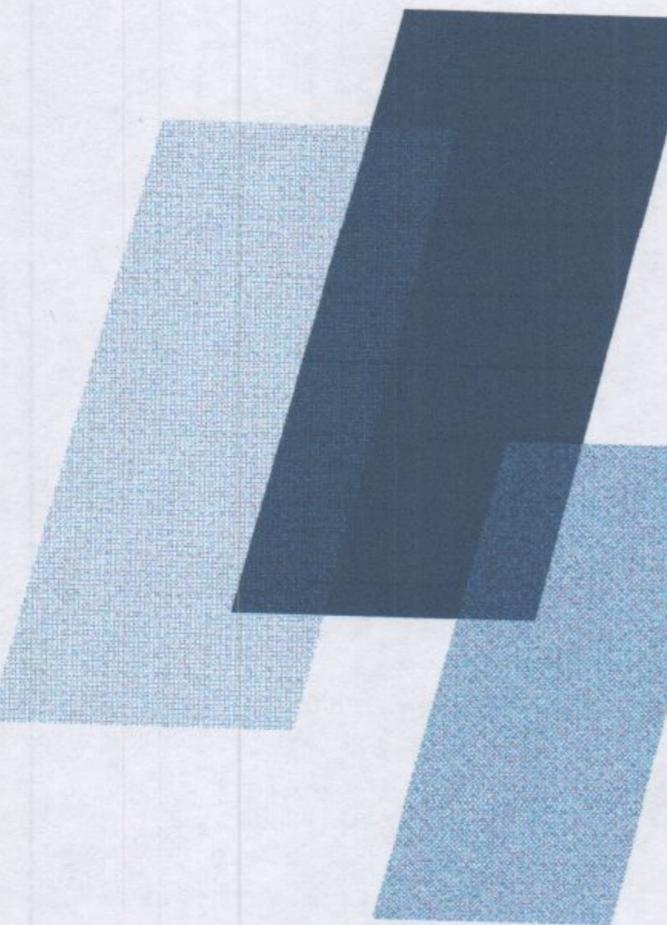




**LKjIP
2019**



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**



**DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BANYUMAS**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 disusun sebagai laporan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 menyajikan capaian kinerja setiap kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2019 dan Penetapan Kinerja OPD Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2019. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja dengan realisasinya. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap kegiatan (proyek) meliputi indikator masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome). Selain berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, LKjIP ini juga bermanfaat bagi peningkatan kinerja di masa mendatang.

Pada tahun 2019, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas menetapkan 2 sasaran pembangunan yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahun 2019. Dalam upaya mewujudkan sasaran-sasaran ini, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas telah melaksanakan 10 program , terdiri dari 48 kegiatan yang dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

Secara Umum, capaian kinerja dari 48 kegiatan yang tercakup dalam 10 Program pembangunan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas selama tahun anggaran 2019 menyerap dana sebesar Rp12.098.529.702,- atau 87,12% dari total anggaran yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp5.840.951.633,- (91,80%) dan Belanja Langsung sebesar Rp 6.257.578.069,- (83,17%).

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan Karunia dan Rahmat-Nya, serta keinginan untuk mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, hingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2019.

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga dapat terwujud *good governance* yang diharapkan. Untuk itu pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sehubungan dengan hal itu, maka dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019.

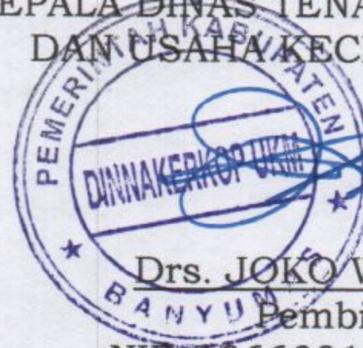
LKjIP ini tersusun berkat kerja keras dari semua pihak yang terlibat dalam pengumpulan data dan informasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas. Namun kami menyadari akan adanya segala kekurangan dalam menyusun LKjIP ini, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan

saran yang bermanfaat guna peningkatan kualitas yang lebih baik pada penyusunan yang akan datang. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Purwokerto, Januari 2020

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH



Drs. JOKO WIYONO, M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19660217 199303 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi OPD serta Struktur Organisasi.....	2
C. Kondisi Kepegawaian dan Sarana Prasarana.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Perencanaan Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Dan Ukm Kabupaten Banyumas.....	7
B. Perjanjian Kinerja (PK).....	8
C. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	9
CAPAIAN KINERJA DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANYUMAS	
1. Capaian Indikator Kinerja Utama.....	11
2. Realisasi Anggaran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas	12
3. Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Strategis	15
BAB IV PENUTUP.....	17
LAMPIRAN :	
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 disusun sebagai bagian dari perwujudan praktek *good governance* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 disusun guna mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah seperti tertuang dalam Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2019 serta Penetapan Kinerja OPD Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019. Selain berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, LKjIP ini juga digunakan sebagai upaya peningkatan kinerja di masa mendatang.

Pada Tahun Anggaran 2019 Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas selama tahun 2019 telah melaksanakan 10 program yang terdiri dari 48 kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas. Dengan terwujudnya sasaran-sasaran tersebut diharapkan pada akhirnya dapat mencapai visi dan misi yang dicita-citakan.

B. Kedudukan, Susunan Organisasi ,Tugas Pokok dan Fungsi OPD serta Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas maka Tugas Pokok dan Fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, Bidang Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah dan Bidang Transmigrasi yang merupakan kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

2. Fungsi

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan umum kesekretariatan, bidang Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, bidang Hubungan Industrial, Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja, bidang Koperasi, bidang Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan umum kesekretariatan, bidang Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, bidang Hubungan Industrial, Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja bidang Koperasi, bidang Usaha Kecil dan Menengah;
- c. Pelaksanaan kebijakan umum kesekretariatan, bidang Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, bidang Hubungan Industrial, Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja bidang Koperasi, bidang Usaha Kecil dan Menengah;

- d. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan kesekretariatan, bidang Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, bidang Hubungan Industrial, Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja bidang Koperasi, bidang Usaha Kecil dan Menengah;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, bidang Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, bidang Hubungan Industrial, Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja bidang Koperasi, bidang Usaha Kecil dan Menengah;
- f. Pelaksanaan administrasi Kesekretariatan, Bidang Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bidang Hubungan Industrial, Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja, Bidang Koperasi, Bidang Usaha Kecil dan Menengah;
- g. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD ; dan
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja; dan
 - 3. Seksi Transmigrasi.
- d. Bidang Hubungan Industrial, Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja, terdiri dari:
 - 1. Seksi Hubungan Industrial; dan
 - 2. Seksi Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja.

e. Bidang Koperasi, terdiri dari :

1. Seksi Kelembagaan dan Usaha Koperasi;
2. Seksi Pengawasan Koperasi; dan
3. Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Koperasi.

f. Bidang Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari :

1. Seksi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah;
2. Seksi Pemberdayaan, Perlindungan dan Pengawasan Usaha Kecil dan Menengah;
3. Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah

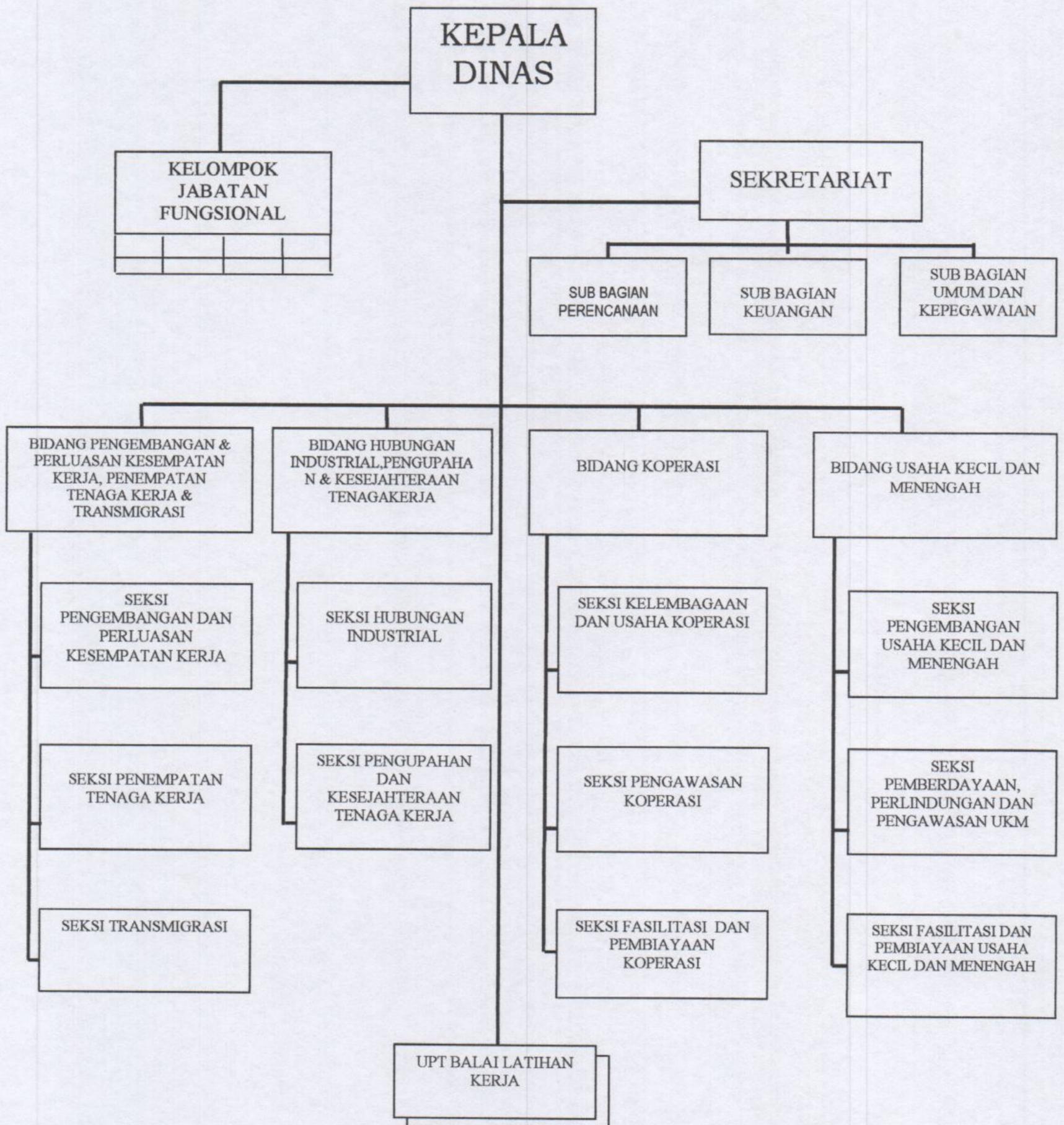
g. UPTD; dan

h. Kelompok jabatan fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas

Berdasarkan Perda Nomor 60 tahun 2016.



C. Kondisi Kepegawaian dan Sarana Prasarana

Tugas pokok, fungsi dan wewenang yang diemban Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas didukung oleh sejumlah pegawai yang sampai dengan 31 Desember 2019 mempunyai 107 pegawai yang terdiri dari 52 orang PNS dan 55 orang Tenaga Honorer Pociokan. Gambaran distribusi jumlah pegawai Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Daftar Pegawai Menurut Eselon Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 menurut tingkat eselon

No	Jabatan	Eselon	Jumlah
1	Kepala Dinas	II/b	1
2	Sekretaris Dinas	III/a	1
3	Kepala Bidang	III/b	4
4	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi/Ka. UPTD	IV/a	15
5	Ka.TU. UPT BLK	IV/b	1
	J u m l a h		22

Tabel 2. Daftar Pegawai Menurut Golongan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas Tahun 2019

No	Jabatan	Jumlah
1	Golongan IV	7
2	Golongan III	35
3	Golongan II	10
	J u m l a h	52

Tabel 3. Daftar Pegawai Menurut Pendidikan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas Tahun 2019

No	Tingkat Eselon / Fungsional	Jumlah
1	S.2	5
2	S.1	26
3	D III	7
4	SLTA	12
5	SLTP	1
6	SD	1
	J u m l a h	52

II. PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BANYUMAS

Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerjanya.

Perencanaan strategis Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018 – 2023, disusun berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 – 2023 Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas.

Perencanaan strategis tersebut disusun sebagai dasar pelaksanaan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas tahun 2019 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Permendagri 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penetapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas berdasarkan isu-isu strategis yang perlu mendapatkan penanganan untuk mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi guna mempercepat pemulihan ekonomi, memperkuat landasan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan mengatasi dampak globalisasi ekonomi.

B. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja adalah suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan, untuk mewujudkan target kinerja tertentu, berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki instansi yang bersangkutan. Perjanjian Kinerja ini menjadi Kontrak Kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat eselon di Dinas Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas sebagai penerima amanah, di mana pada setiap akhir tahunnya akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja serta penilaian terhadap para pejabatnya.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2019 (RKT) selaras dengan isi dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas dengan Bupati Tahun 2019 yang dibuat pada awal tahun memuat 3 sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja yang diampu oleh 10 program dan 48 kegiatan dengan total anggaran Rp 7.523.874.270,-.

Tabel 2.1
Lampiran Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	66,09
2	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan melalui Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	30
3	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan melalui UMKM	Persentase Pertumbuhan UMKM	0,47

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Tabel 2.2
Lampiran Perjanjian Kinerja (PK) Program dan Anggaran
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM
Kabupaten Banyumas Tahun 2019

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.624.883.720
2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	325.000.000
3	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	100.000.000
4	Program Perlindungan dan Pengembangan Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	315.000.000
5	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	530.000.000
6	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	1.654.000.000
7	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	652.000.000
8	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	250.000.000
9	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	3.276.990.550
10	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan	100.000.000
	Jumlah	Rp7.523.874.270

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019
Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	FORMULASI
1.	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja (15-64th)}} \times 100\%$
2.	Meningkatnya Usaha serta daya saing koperasi dan UMKM	1. Persentase Koperasi Sehat	$\frac{\text{Jumlah Koperasi Sehat}}{\text{Jumlah Koperasi Terdaftar}} \times 100\%$

		2. Persentase Pertumbuhan UMKM	$\frac{\text{Jumlah UMKM tumbuh th n-}}{\text{Jumlah Total UMKM tahun n}} \times 100\%$
--	--	--------------------------------------	---

Sumber : Dokumen Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

Sasaran strategis yang tercantum di dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas Tahun 2019 sesuai dengan sasaran di dalam RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, sasaran pada misi ketujuh RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yang berbunyi mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)) Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian atau tingkat capaian kinerja program dan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas dalam rangka mewujudkan pembangunan di bidang Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Banyumas.

III. AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANYUMAS

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019 disusun guna mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas seperti tertuang dalam Perencanaan Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 serta Penetapan Kinerja SKPD Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019.

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas mengampu 10 program dimana secara langsung maupun tidak langsung mendukung pencapaian indikator kinerja.

Target realisasi dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas Tahun 2019 secara rinci dapat dilihat dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM
Kabupaten Banyumas Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	66.09	67.10	101.52
2.	Meningkatnya Usaha serta daya saing koperasi dan UMKM	1. Persentase Koperasi Sehat	30.00	25.09	83.63
		2. Persentase Pertumbuhan UMKM	0.47	0.55	117.02

2. Realisasi Anggaran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM
Kabupaten Banyumas

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel 3.2.

Tabel 3.2
Realisasi Anggaran Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas
Tahun Anggaran 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	
				Rp	%
1.	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Rp. 5.991.874.270	Rp. 4.909.780.051	81,94
2.	Meningkatnya Usaha serta daya saing koperasi dan UMKM	1. Persentase Koperasi Sehat	Rp. 652.000.000	Rp. 561.078.457	86,05
		2. Persentase Pertumbuhan UMKM	Rp. 880.000.000	Rp. 786.719.561	89,40
Jumlah			Rp. 7.523.874.270	Rp. 6.257.578.069	83,17

Berdasarkan tabel 3.2 diketahui bahwa untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas, direncanakan anggaran sebesar Rp. 7.523.874.270,-. Dari rencana anggaran tersebut untuk mewujudkan kinerja sasaran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas terealisasi sebesar Rp. 6.257.578.069,- atau 83.17 % dari anggaran yang telah direncanakan. Pencapaian kinerja sasaran sesuai dengan tabel 3.2 didukung secara langsung oleh Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Peningkatan Kesempatan Kerja, Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, Program Perlindungan dan Pengembangan Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja, Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, Program Penciptaan Iklim

Usaha Kecil Menengah yang Kondusif, Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif UKM dan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

Walaupun demikian, pencapaian kinerja sasaran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas tidak dapat dilihat secara parsial karena selain program yang secara langsung mendukung pencapaian kinerja sasaran juga terdapat program-program lain yang memiliki peran serta dalam mewujudkan kinerja sasaran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas secara optimal. Berikut adalah realisasi anggaran dari program-program yang turut berperan serta dalam pencapaian kinerja sasaran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas.

Tabel 3.3
Realisasi Anggaran Program Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019

No.	Program	Anggaran	Realisasi Anggaran	Keterangan
1.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp1.624.883.720	Rp1.319.997.778	81,24%
2.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Rp325.000.000	Rp279.072.276	85,87
3.	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Rp100.000.000	Rp97.925.725	97,93
4.	Program Perlindungan dan Pengembangan Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Rp315.000.000	Rp285.989.812	90,79
5.	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Rp100.000.000	Rp58.508.089	58,51
6.	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Rp3.276.990.550	Rp2.681.818.135	81,84

No.	Program	Anggaran	Realisasi Anggaran	Keterangan
7.	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Rp530.000.000	Rp475.247.053	89,67
8.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif UKM	Rp350.000.000	Rp311.472.508	88,99
9.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Rp652.000.000	Rp561.078.457	86,05
10.	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Rp250.000.000	Rp186.468.236	74,59
	Jumlah	Rp7.523.874.270	Rp6.257.578.069	83,17%

Berdasarkan tabel 3.3 diketahui bahwa terdapat 10 program yang turut berperan serta dalam mewujudkan pencapaian kinerja sasaran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas karena pelaksanaan 10 program tersebut secara sistematis memiliki pengaruh terhadap pencapaian kinerja sasaran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas. Perwujudan akuntabilitas keuangan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas, selain tercermin dari realisasi anggaran pencapaian kinerja sasaran juga dapat dilihat melalui realisasi anggaran, berdasarkan belanja yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran berdasarkan Belanja Dinas Tenaga Kerja,
Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas
Tahun Anggaran 2019

No	Uraian Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi	%
1.	Belanja Tidak Langsung	Rp6.362.584.819	Rp5.840.951.633	91,80%
2.	Belanja Langsung	Rp7.523.874.270	Rp6.257.578.069	83,17%
	Jumlah	Rp13.886.459.089	Rp12.098.529.702	87,12%

Berdasarkan tabel 3.4 diketahui bahwa pagu anggaran belanja tidak langsung Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp6.362.584.819,- dengan realisasi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp5.840.951.633,- (91,80%). Sedangkan pagu anggaran belanja langsung sebesar Rp7.523.874.270,- dengan realisasi anggaran belanja langsung Rp Rp6.257.578.069,- (83,17%). Total pagu anggaran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp13.886.459.089,- dengan realisasi Rp12.098.529.702,- (87,12%).

3. Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Strategis

Efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas berdasar pada Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel 3.5.

Tabel 3.5
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Strategis
Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas
Banyumas Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran	
				Rp	%
1.	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	101.52	Rp. 4.909.780.051	81,94
2.	Meningkatnya Usaha serta daya saing koperasi dan UMKM	1. Persentase Koperasi Sehat	83.63	Rp. 561.078.457	86,05
		2. Persentase Pertumbuhan UMKM	117.02	Rp. 786.719.561	89,40
Jumlah				Rp. 6.257.578.069	83,17

Berdasarkan tabel 3.5 diketahui bahwa dalam upaya pencapaian sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas diwujudkan melalui 3 Indikator Kinerja Utama dengan 2 capaian Kinerja diatas 100 % dengan realisasi anggaran yang cukup baik yaitu Rp. 6.257.578.069,- (83,17%)

IV. PENUTUP

LKjIP Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta pertanggungjawaban kewenangan pengelolaan sumber daya demi tercapainya *good governance* yang merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

LKjIP sebagai salah satu bentuk laporan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan merupakan kendali, penilai kualitas kinerja, dan pendorong peningkatan kinerja. Melalui pelaporan kinerja yang baik, diharapkan akan diperoleh suatu pertanggungjawaban yang transparan sebagai umpan balik dalam perbaikan kinerja di masa mendatang.

Dalam perkembangannya, penyusunan LKjIP Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini mempunyai banyak kekurangan, sehingga untuk tahun-tahun ke depan diperlukan penyempurnaan sub-sub sistem pendukung sistem kinerja instansi pemerintahan secara keseluruhan yang lebih baik.

Purwokerto, Januari 2020

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH



Drs. JOKO WIYONO, M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19660217 199303 1 002

7	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	100.000.000,00
8	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	1.032.500.000,00
9	Program Pengembangan dan Penempatan Transmigrasi	147.500.000,00
TOTAL		7.887.000.000,00

Purwokerto, Januari 2020

Pihak Kedua,

BUPATI BANYUMAS

Ir. ACHMAD HUSEIN

Pihak Pertama,

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BANYUMAS**



Drs. JOKO WIYONO, M.Si
NIP. 19660217 199303 1 002